

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB). Kabupaten Brebes disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB)) Kabupaten Brebes merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes mempunyai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.

3) **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

4) **Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)**

Membantu para pengguna Laporan Keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. **Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan SKPD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi.

Tujuan umum Laporan Keuangan SKPD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi entitas pelaporan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Brebes dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- 3) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan retribusi;
- 6) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan dana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan ini terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran ;
- b) Neraca ;
- c) Laporan Operasional ;
- d) Laporan Perubahan Ekuitas;
- e) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu

periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pendapatan;
- b) Belanja;
- c) Transfer ;
- d) Surplus/Defisit ;
- e) Pembiayaan ;
- f) Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran

Neraca

Neraca Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Kami mengklasifikasikan aset dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Kami mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima kembali atau dibayar kembali dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a) Kas dan setara kas ;
- b) Investasi jangka pendek ;
- c) Piutang pajak dan bukan pajak ;
- d) Persediaan ;
- e) Investasi jangka panjang ;
- f) Aset tetap ;
- g) Kewajiban jangka pendek ;
- h) Kewajiban jangka panjang ;
- i) Ekuitas.

Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- a) Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional;
- b) Beban dari Kegiatan Operasional;
- c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional;
- d) Surplus/defisit-LO

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Kinerja APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan

- Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah ;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah.
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 ;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022;
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021;
- 30. Peraturan Bupati Brebes Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022;
- 31. Peraturan Bupati Brebes Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022;
- 32. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai Peraturan Bupati Brebes Nomor 134 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 133 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan disusun adalah sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan		
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD	
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD	
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD	
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD		
	2.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD	
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	
Bab III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD		
	3.1	LRA	
		3.1.1	Pendapatan_LRA
		3.1.2	Belanja
	3.2	LO	

Bab I	Pendahuluan		
		3.2.1	Pendapatan –LO
		3.2.2	Beban
		3.2.3	Kegiatan Non Operasional
		3.2.4	Pos Luar Biasa
	3.3	Laporan Perubahan Ekuitas	
		3.3.1	Perubahan Ekuitas
	3.4	Neraca	
		3.4.1	Aset
		3.4.2	Kewajiban
		3.4.3	Ekuitas
	3.5	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang rnenggunakan basis akrual pada Pemda.	
	3.6	Laporan Arus Kas BLUD	
	3.7	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD	
Bab IV	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD		
Bab V	Penutup		

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target Kinerja APBD. Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dan efisien pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.

Untuk memberikan gambaran secara jelas ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel bawah ini :

1. *Tabel pencapaian target dan realisasi belanja*

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	Belanja Pegawai	4.732.486.354,00	2.672.917.595,00	(2.059.568.759,00)	56,48
2	Belanja Barang dan Jasa	17.602.424.772,00	15.832.674.030,00	(1.769.750.742,00)	89,95
3	Belanja Modal	1.110.025.000,00	1.101.289.000,00	(8.736.000,00)	99,21
	Jumlah	23.444.936.126	19.606.880.625,00	(3.838.055.501,00)	83,63

Kinerja mengenai anggaran belanja dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 2.672.917.595,00 dari anggaran yang ditetapkan Rp 4.732.486.354,00 atau 56,48 %.
- b. Realisasi Belanja Barang Jasa sebesar Rp 15.832.674.030,00 dari anggaran yang ditetapkan Rp 17.602.424.772,00 atau 89,95 %.
- c. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 1.101.289.000,00 dari anggaran yang ditetapkan Rp 1.110.025.000,00 atau 99,21 %.

Secara keseluruhan realisasi belanja mencapai 83,63 % dari yang dianggarkan.

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

- 1 Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *Time Scedule* dari anggaran kas yang telah direncanakan karena adanya keterlambatan turunnya dana BOKB, sehingga kegiatan kegiatan yang bersumber pada Dak Non Fisik agak terlambat di laksanakan.
- 2 Ada beberapa kegiatan yang dianggarkan setelah perubahan APBD sehingga rentang waktu pelaksanaannya singkat, hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN SKPD

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.2 Belanja

Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2022 yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah, meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran sebesar Rp 19.606.880.625,00 dari anggaran Rp 23.444.936.126, 00 dengan perincian sebagai berikut :

Belanja :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Belanja Operasi	22.334.911.126,00	18.505.591.625,00	82,86	11.010.286.862,00
b. Belanja Modal	1.110.025.000,00	1.101.289.000,00	99,21	1.618.757.160,00
c. Belanja Tak Terduga				
d. Belanja Transfer				
Jumlah	23.444.936.126,00	19.606.880.625,00	83,63	12.629.044.022,00

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Dalam Tahun Anggaran 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes merealisasikan belanja operasi sebesar Rp 18.505.591.625,00 dari anggaran sebesar Rp 22.334.911.126,00 Komposisi realisasi belanja operasi sebagai berikut :

Belanja Operasi :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
Belanja Pegawai	4.732.486.354,00	2.672.917.595,00	56,48	2.541.269.750,00
Belanja Barang dan Jasa	17.602.424.772,00	15.832.674.030,00	89,95	8.469.017.112,00
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah	22.334.911.126,00	18.505.591.625,00	82,86	11.010.286.862,00

a. Rincian/penjelasan Belanja Pegawai sebagai berikut :

Belanja Pegawai :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Gaji dan Tunjangan	3.353.141.000,00	1.447.660.150,00	43,17	1.646.549.915,00
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.216.095.354,00	1.062.007.445,00	87,33	891.319.835,00
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	163.250.000,00	163.250.000,00	100,00	3.400.000,00
d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD				
e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH				
f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH				
g. Belanja Pegawai BOS				
h. Belanja Pegawai BLUD				
Jumlah	4.732.486.354,00	2.672.917.595,00	56,48	2.541.269.750,00

b. Rincian/penjelasan Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Belanja Barang	1.975.715.262,00	1.926.484.318,00	97,51	2.184.706.846,00
b. Belanja Jasa	14.435.601.520,00	12.754.702.905,00	88,36	5.356.622.631,00
c. Belanja Pemeliharaan	229.165.280,00	219.746.479,00	95,89	167.679.329,00
d. Belana Perjalanan Dinas	746.942.710,00	716.740.328,00	95,96	733.538.306,00
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	215.000.000,00	215.000.000,00	100,00	26.470.000,00
f. Belanja Barang dan Jasa BOS				
g. Belanja Barang dan Jasa BLUD				
J u m l a h	17.602.424.772,00	15.832.674.030,00	89,95	8.469.017.112,00

1) Belanja Barang merupakan belanja barang persediaan sesuai rincian sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Belanja Barang Pakai Habis	1.975.715.262	1.926.484.318,00	97,51	2.184.706.846,00
b. Belanja Barang Tak Habis Pakai				
c. Belanja Barang Bekas Dipakai				
J u m l a h	1.975.715.262	1.926.484.318,00	97,51	2.184.706.846,00

Penjelasan :

Rincian Belanja Barang Pakai Habis disajikan pada lampiran 3.1.1

2) Belanja Jasa sebesar Rp 12.754.702.905,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Jasa :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Belanja Jasa Kantor	14.270.318.520,00	12.598.190.239,00	88,28	5.215.172.631
b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.908.000,00	6.687.666,00	61,31	
c. Belanja Sewa Tanah				
d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	136.250.000,00	136.250.000,00	100,00	80.900.000,00
e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	18.125.000,00	13.575.000,00	74,90	18.850.000
f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi				
g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya				2.000.000,00
h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi				39.700.000,00
i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi				
j. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)				
k. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS				
l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				
m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah				
n. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah				
J u m l a h	14.435.601.520,00	12.754.702.905,00	88,36	5.356.622.631,00

3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 219.746.479,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pemeliharaan :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Belanja Pemeliharaan Tanah				
b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	229.165.280,00	219.746.479,00	95,89	167.679.329,00

c.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				
d.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
e.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				
J u m l a h		229.165.280,00	219.746.479,00	95,89	167.679.329,00

4) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 716.740.328,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas:		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	746.942.710,00	716.740.328,00	95,96	733.538.306,00
b.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri				
J u m l a h		746.942.710,00	716.740.328,00	95,96	733.538.306,00

5) Belanja Uang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp 215.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Uang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masy :		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	215.000.000,00	215.000.000,00	100,00	26.470.000,00
b.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
J u m l a h		215.000.000,00	215.000.000,00	100,00	26.470.000,00

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi berupa pengeluaran untuk perolehan aset tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan,dan aset tetap lainnya serta belanja modal aset tidak berwujud. Realisasi belanja modal dalam Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 1.101.289.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 1.110.025.000,00 dengan rincian:

Belanja Modal :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Belanja Modal Tanah				

Belanja Modal :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	865.945.000,00	857.689.000,00	99,05	1.264.427.860,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	244.080.000,00	243.600.000,00	99,80	354.329.300,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
g. Belanja Modal Aset Lainnya				
Jumlah	1.110.025.000,00	1.101.289.000,00	99,21	1.618.757.160,00

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 857.689.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Peralatan dan Mesin :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Belanja Modal Alat Besar				
b. Belanja Modal Alat Angkutan	600.000.000,00	593.500.000,00	98,92	381.000.000,00
c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur				
d. Belanja Modal Alat Pertanian				
e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	129.821.000,00	128.800.000,00	99,21	260.216.700,00
f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar				
g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan				265.650.000,00
h. Belanja Modal Alat Laboratorium				
i. Belanja Modal Komputer	136.124.000,00	135.389.000,00	99,46	357.561.160,00
j. Belanja Modal Alat Eksplorasi				
k. Belanja Modal Alat Pengeboran				
l. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian				
m. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi				

Belanja Peralatan dan Mesin :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
n. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja				
o. Belanja Modal Alat Peraga				
p. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi				
q. Belanja Modal Rambu-Rambu				
r. Belanja Modal Peralatan Olahraga				
s. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS				
t. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				
u. Belanja Modal Alat Rumah Tangga				
Jumlah	865.945.000,00	857.689.000,00	99,05	1.264.427.860,00

- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 243.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Gedung dan Bangunan :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Belanja Modal Bangunan Gedung	244.080.000,00	243.600.000,00	99,80	354.329.300,00
b. Belanja Modal Monumen				
c. Belanja Modal Bangunan Menara				
d. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti				
e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD				
Jumlah	244.080.000,00	243.600.000,00	99,80	354.329.300,00

3.2 PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun.Laporan operasional menyajikan pos-pos Pendapatan-LO, Beban, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa.

3.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Brebes yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2022 dan 2021.

Pendapatan-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.430.609.851,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Pendapatan-LO				
1. Pendapatan Asli Daerah – LO				
2. Pendapatan Transfer – LO				
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO	3.430.609.851,00	3.081.178.095,00	349.431.756,00	11.34
Jumlah	3.430.609.851,00	3.081.178.095,00	349.431.756,00	11.34

1. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO tahun 2022 adalah sebesar Rp 3.430.609.851,00 sesuai tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO				
a. Pendapatan Hibah – LO	3.430.609.851,00	3.081.178.095,00	349.431.756,00	11,34
b. Dana Darurat – LO				
c. Pendapatan Lainnya – LO				
Jumlah	3.430.609.851,00	3.081.178.095,00	349.431.756,00	11,34

a. Rincian Pendapatan Hibah – LO :

Pendapatan hibah – LO dirinci sesuai tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Pendapatan Hibah – LO				
a. Pendapatan Hibah BEC				
b. Penerimaan Pabrik Gula				
c. Pendapatan Hibah Barang	3.430.609.851,00	3.081.178.095,00	349.431.756,00	11,34
d. Dst.....				
Jumlah	3.430.609.851,00	3.081.178.095,00	349.431.756,00	11,34

3.2.2 Beban

Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Beban				
a. Beban Operasi	19.594.896.733,00	12.123.996.067,00	7.470.900.666,00	61,62
b. Beban Transfer				
Jumlah	19.594.896.733,00	12.123.996.067,00	7.470.900.666,00	61,62

1. Rincian Beban Operasi sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
BEBAN OPERASI				
a. Beban Pegawai	2.680.361.529,00	2.563.374.625,00	116.986.904,00	4,56
b. Beban Persediaan	1.927.936.268,00	2.008.001.300,00	(80.065.032,00)	(3,99)
c. Beban Jasa	12.970.322.499,00	5.385.024.359,00	7.585.298.140,00	140,86
d. Beban Pemeliharaan	205.644.479,00	162.753.329,00	42.891.150,00	26,35
e. Beban Perjalanan Dinas	716.740.328,00	733.538.306,00	(16.797.978,00)	(2,29)
f. Beban Bunga				
g. Beban Subsidi				
h. Beban Hibah				
i. Beban Bantuan Sosial	222.008.105,00	410.935.785,00	(188.927.680,00)	(45,97)
j. Beban Penyusutan dan Amortisasi	871.883.525,00	860.368.363,00	11.515.162,00	1,34
k. Beban Penyisihan Piutang				
l. Beban Lain-lain				
Jumlah	19.594.896.733,00	12.123.996.067,00	7.470.900.666,00	61,62

a. Beban Hibah

Realisasi Beban Hibah TA 2022 sebesar Rp 0 , merupakan Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta termasuk di dalamnya Beban Barang-barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat. Beban hibah yang dicatat adalah sesuai nilai barang yang diserahkan sebesar Rp 0,00 Rekap Mutasi Barang yang dihibahkan kepada pihak ke-3 sebagai berikut :

Saldo 2021		Pengadaan 2022		Dihibahkan 2022		Reklasifikasi AT		Sisa 2022	
Jml Brg	Jumlah (Rp)	Jml Brg	Jumlah (Rp)	Jml Brg	Jumlah (Rp)	Jml Brg	Jumlah (Rp)	Jml Brg	Jumlah (Rp)
		1	16.031.250	1	16.031.250				
		1	16.031.250	1	16.031.250				
		1	16.031.250	1	16.031.250				
		1	16.031.250	1	16.031.250				
		1	16.031.250	1	16.031.250				
		1	16.031.250	1	16.031.250				
		1	16.031.250	1	16.031.250				
		1	16.031.250	1	16.031.250				
		1	12.518.750	1	12.518.750				
		1	12.518.750	1	12.518.750				
		1	12.518.750	1	12.518.750				
		1	12.518.750	1	12.518.750				
		1	12.518.750	1	12.518.750				
		1	12.518.750	1	12.518.750				
		1	12.518.750	1	12.518.750				
		1	12.518.750	1	12.518.750				
			228.400.000		228.400.000				

b. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan aset tetap tahun 2022 adalah sebesar Rp . 871.883.525,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp 780.000.882,00
- b) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp 90.082.643,00
- c) Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp
- d) Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Rp

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2022 berupa amortisasi software sebesar Rp. 1.800.000,00 Rincian Beban Amortisasi dan Akumulasi Amortisasi tahun 2022 sebagai berikut :

Nama Software	Umur s.d 2022	Nilai Software (Rp)	Amortisasi per tahun (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2021 (Rp)	Beban Amortisasi 2022 (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2022 (Rp)
Aplikasi Data PUS	5	9.000.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00	1.800.000,00	9.000.000,00
Aplikasi Kepegawaian dan Pelaporan Thn 2013	5	25.000.000	5.000.000,00	25.000.000		25.000.000
Jumlah	5	34.000.000,00	6.800.000,00	32.200.000,00	1.800.000,00	34.000.000,00

3.2.3 Kegiatan Non Operasional

Rincian Kegiatan Non Operasional sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
SURPLUS NON OPERASIONAL – LO				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO				
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO				
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO				
JUMLAH				
DEFISIT NON OPERASIONAL		390.794.155,00	(390.794.155,00)	(100,00)
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO				
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		390.794.155,00	(390.794.155,00)	(100,00)
JUMLAH		390.794.155,00	(390.794.155,00)	(100,00)
SURPLUS DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL – LO		390.794.155,00	(390.794.155,00)	(100,00)

1. Surplus Non Operasional

Secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	
1	Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	
2	Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	
3	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang- LO	
4	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO	
	Jumlah	
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	
1	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	
2	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO	
3	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	
4	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO	
5	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
	Jumlah	
	Total	NIHIL

Penjelasan :

a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO

Pada tahun 2022 dilaksanakan penjualan aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp . Barang-barang tersebut telah dijual dengan nilai buku Rp (nilai perolehan – nilai penyusutan). Penerimaan kas pada SKPD atas penjualan tersebut sebesar Rp 0,00 (hasil penjualan langsung disetor ke Kas Daerah). Selisih atas nilai jual terhadap nilai buku dicatat sebagai Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO sebesar Rp .

b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO sebesar Rp

c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp

2. Defisit Non Operasional

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	
1	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	
2	Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	
3	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO	
	Jumlah	
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	
1	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	
2	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO	
3	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	

No	Uraian	Jumlah (Rp)
4	Defisit Penyelesaian Obligasi-LO	
5	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO	
6	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO	
	Jumlah	-
	Total	NIHIL

Penjelasan :

a. Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO

Pada tahun 2022 dilaksanakan penjualan aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp . Barang-barang tersebut telah dijual dengan nilai buku Rp (nilai perolehan – nilai penyusutan). Penerimaan kas pada OPD atas penjualan tersebut sebesar Rp 0,00 karena hasil penjualan langsung disetor ke Kas Daerah. Selisih atas nilai jual terhadap nilai buku dicatat sebagai Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO sebesar Rp .

b. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO sebesar Rp

c. Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp

3.2.4. Pos Luar Biasa

Pendapatan dari Pos Luar Biasa sebesar NIHIL dan Beban dari Pos Luar Biasa sebesar NIHIL.

3.3 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA 2022 dibandingkan dengan TA 2021. Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar **Rp 8.501.577.872,00** berasal dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp 7.986.575.176,00 , ditambah Surplus-LO TA 2022 sebesar minus **Rp (16.164.286.882,00)** ditambah Dampak Kumulatif Perubahan/Kebijakan/Kesalahan Mendasar **Rp (2.927.591.047,00)** , dan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan sebesar **Rp. 19.606.880.625,00** .

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan/Kebijakan/Kesahan Mendasar sebagai berikut :

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Koreksi Ekuitas Lainnya	(2.927.591.047,00)	(3.709.090.564,00)
Jumlah	(2.927.591.047,00)	(3.709.090.564,00)

Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp. (2.927.591.047,00) merupakan selisih dari penambahan dan pengurangan koreksi ekuitas lainnya (Rp. 116.289.090,00 – Rp. 3.353.575.462,00 sesuai jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Penambahan Koreksi Ekuitas Lainnya

Uraian	2022(Rp)
Serah Terima Kas Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Piutang/Beban Dibayar Dimuka Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Persediaan Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Aset Tetap Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Aset Lainnya Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Koreksi saldo awal Aset tetap (mutasi masuk antar SKPD tahun-tahun sebelumnya) - KOR+MM	
Koreksi saldo awal (inventarisasi barang belum tercatat/berlebih) - KOR+LBH	
Koreksi saldo awal Aset tetap (hibah masuk tahun-tahun sebelumnya) - KOR+HBM	
Koreksi saldo awal Aset tetap (atribusi nilai sertifikat tanah tahun-tahun sebelumnya) - KOR+SER	
Koreksi saldo awal Aset tetap (hilang pencatatan) - KOR+HCTT	
Koreksi saldo awal Aset tetap (Perubahan Tabel Perhitungan Kapitalisasi) - KOR+/-TKAP	
Koreksi saldo awal Aset tetap (Perubahan Batas Nilai Kapitalisasi) - KOR+NKAP	
Koreksi saldo awal (pencatatan penilaian barang hasil inventarisasi) - KOR+NILAI	
Koreksi saldo awal tambah (reklasifikasi aset tetap penyesuaian kode permendagri 108)	
Pencatatan mutasi masuk aset tetap dari OPD - MM	65.253.673,00
Penyesuaian akumulasi penyusutan mutasi tambah OPD	
Penyesuaian akumulasi penyusutan mutasi keluar aset tetap	309.695.325,00
Mutasi Masuk Barang Rusak Berat antar SKPD	
Pencatatan Koreksi Saldo Awal Piutang	
Pencatatan Koreksi Saldo Awal Penyisihan Piutang	
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Jasa Ex-Dana Bergulir	
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Pokok Ex-Dana Bergulir	
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Denda keterlambatan	
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang TGR karena setoran atau pengurangan nilai piutang TGR	
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Pajak	
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Denda Pajak	
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Retribusi	
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang BLUD	
Koreksi saldo awal Utang Jangka Pendek Lainnya karena	
Mutasi masuk barang persediaan dari SKPD/Unit ...	1.045.400,00
Reklasifikasi persediaan ke ekstrakomtabel	
Koreksi saldo awal kas	
Pengembalian piutang POKOK ex-Dana Bergulir Dinas Koperasi, penerimaan kas di PPKD piutang dicatat di Dinas Koperasi	
Pengembalian piutang POKOK ex-Dana Bergulir kepada masyarakat, penerimaan kas di PPKD piutang dicatat di SKPD pengelola (non Dinas Koperasi)	
Penyesuaian penyisihan piutang atas penerimaan piutang TGR Khusus PPKD	
Koreksi Kurang Penyusutan 2022	49.990.017,00
Pengurangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pusat	
Pengurangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	
Pengurangan penyisihan piutang bagian laba/deviden atas PMPD pada BUMD	
Jumlah	425.984.415,00

2. Pengurangan Koreksi Ekuitas Lainnya

Uraian	2022(Rp)
Serah Terima Kas Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Piutang/Beban Dibayar Dimuka Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Persediaan Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Aset Tetap Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Aset Lainnya Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Kewajiban/Utang/Pendapatan Diterima Dimuka Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Koreksi saldo awal Aset tetap (penghapusan tahun-tahun sebelumnya) - KOR-HPS	
Koreksi saldo awal Aset tetap (mutasi keluar antar SKPD tahun-tahun sebelumnya) - KOR-MUT	
Koreksi saldo awal Aset tetap (perubahan batas nilai kapitalisasi) - KOR-NKAP	
Koreksi saldo awal kurang (pemeliharaan tahun-tahun sebelumnya) - KOR-PEMEL	
Koreksi saldo awal Aset tetap (dobel pencatatan) - KOR-DOB	
Koreksi saldo awal kurang (reklasifikasi aset tetap penyesuaian kode permendagri 108)	
Pencatatan mutasi keluar aset tetap ke OPD - MUT	
Penghapusan barang Baik (B)/Rusak Ringan (RR) - HPS	
Koreksi Penyesuaian akumulasi peyusutan	65.253.676,00
Penyesuaian akumulasi penyusutan mutasi masuk aset tetap	
Koreksi saldo awal aset lainnya barang Rusak Berat (RB)/Tidak Ditemukan (TD) karena	
Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Barang RB/TD	
Koreksi saldo awal Akumulasi Amortisasi ATB	
Mutasi Keluar asset tetap ke SKPD lain	355.099.610,00
Penghapusan Aset Lain-Lain - Aset Tidak Berwujud Software	
Pengembalian pokok ex-Dana Bergulir, penerimaan kas di PPKD	
Koreksi saldo awal utang belanja karena	
Mutasi keluar barang persediaan ke SKPD/Unit	2.933.222.176,00
Reklasifikasi persediaan ke Kadaluarsa/Usang/Rusak	
Koreksi saldo awal beban dibayar di muka	
Penyesuaian saldo awal Pendapatan diterima di muka	
Jumlah	3.353.575.462,00

3.4 PENJELASAN POS-POS NERACA

3.4.1 ASET

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	Th. 2022	Th. 2021
ASET		
1. Aset Lancar	1.194.915.182,00	919.942.162,00
2. Aset Tetap	7.393.727.551,00	7.146.554.347,00
3. Aset Lainnya	5.608.315,00	7.408.315,00
Jumlah Aset	8.594.251.048,00	8.073.904.824,00
KEWAJIBAN & EKUITAS		
1. Kewajiban	92.673.176,00	87.329.648,00
2. Ekuitas	8.501.577.872,00	7.986.575.176,00
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas	8.594.251.048,00	8.073.904.824,00

1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Th. 2022	Th. 2021
Kas		
Piutang		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		
Persediaan	1.194.915.182,00	919.942.162,00
Beban Dibayar Dimuka		
Jumlah Aset Lancar	1.194.915.182,00	919.942.162,00

A. PERSEDIAAN

Rekening ini menggambarkan harga perolehan persediaan barang pakai habis yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dengan rincian saldo per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

Persediaan :	Th. 2022	Th. 2021
Bahan		
Suku Cadang		
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.694.200,00	2.100.750,00
Obat-obatan	1.193.220.982,00	917.841.412,00
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		
Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga		
Natura dan Pakan		
Persediaan Penelitian		
Persediaan Dalam Proses		
Persediaan Barang BOS		
Jumlah	1.194.915.182,00	919.942.162,00

Penambahan dan pengurangan selama tahun 2022 dijelaskan pada tabel berikut :

Persediaan :	Saldo 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2022
Bahan		94.703.488,00	94.703.488,00	
Suku Cadang		60.000,00	60.000,00	
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	2.100.750,00	743.778.130,00	744.184.680,00	1.694.200,00
Obat-obatan	917.841.412,00	3.440.618.751,00	3.165.239.181,00	1.193.220.982,00
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		142.092.000,00	142.092.000,00	
Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga		4.664.000,00	4.664.000,00	
Natura dan Pakan		932.223.200,00	932.223.200,00	
Persediaan Penelitian				
Persediaan Dalam Proses				
Persediaan Barang BOS				
Jumlah	919.942.162,00	5.358.139.569,00	5.083.166.549,00	1.194.915.182,00

Mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2022 secara rinci dijelaskan pada tabel berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
SALDO AWAL	919.942.162,00
Koreksi (+) Saldo Awal	
Pengadaan / Pembelian	1.926.484.318,00
Reklas Dari Belanja Tdk Terduga	
Reklas Dari B. Modal	
Reklas Dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	
Reklas Dari B. Pegawai	
Reklas Dari B. Jasa	
Reklas Dari Pemeliharaan	
Mutasi / Transfer Masuk	1.045.400,00
Hibah Masuk	3.430.609.851,00
Hutang Persediaan	
Reklas Antar Beban Persediaan (+)	
Jumlah Penambahan	5.358.139.569,00
Koreksi (-) Saldo Awal	
Pemakaian	1.927.936.268,00
Mutasi Keluar	2.933.222.176,00
Hibah Keluar	222.008.105,00

Uraian	Nilai (Rp)
Reklas Ke Aset Tetap	
Reklas Ke Ekstrakomtabel	
Reklas Ke Belanja Pegawai	
Reklas Ke Belanja Jasa	
Reklas Ke Belanja Pemeliharaan	
Pindah Ke Kadaluarsa/-Rusak	
Reklas Antar Beban Persediaan (-)	
Jumlah Pengurangan	5.083.166.549,00
SALDO AKHIR PERSEDIAAN	1.194.915.182,00

B. ASET TETAP DAN AKUMULASI PENYUSUTAN

1. Aset Tetap

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Brebes berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan aset tetap yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes per 31 Desember 2022 dan 2021. Perolehan aset tetap berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang didalamnya termasuk pengadaan aset tetap dalam tahun anggaran berkenaan dan/atau perolehan lainnya yang sah. Belanja yang tidak dikapitalisasi berdasarkan kebijakan akuntansi adalah Belanja Perjalanan Dinas, Belanja ATK, penggandaan dan sejenisnya.

Saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 7.146.554.347,00 dan Rp. 7.393.727.551,00 dengan rincian sebagai berikut :

Aset Tetap :	Th. 2022	Th. 2021
a. Tanah	18.000.000,00	18.000.000,00
b. Peralatan dan Mesin	8.237.521.620,00	7.732.390.230,00
c. Gedung dan Bangunan	5.840.961.950,00	5.588.521.950,00
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
e. Aset Tetap Lainnya	53.484.673,00	53.484.673,00
f. Konstruksi dalam Pekerjaan	0	0
g. Akumulasi Penyusutan	(6.756.240.692,00)	(6.245.842.506,00)
Jumlah Aset Tetap	7.393.727.551,00	7.146.554.347,00

Mutasi aset tetap tahun 2022 sebagai berikut :

URAIAN JENIS	SALDO 2021	PENAMBAHA N	PENGURANGA N	SALDO 2022
a. Tanah	18.000.000,00			18.000.000,00
b. Peralatan dan Mesin	7.732.390.230,00	862.951.000,00	357.819.610,00	8.237.521.620,00
c. Gedung dan Bangunan	5.588.521.950,00	252.440.000,00		5.840.961.950,00
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0			
e. Aset Tetap Lainnya	53.484.673,00			53.484.673,00
f. Konstruksi dalam Pekerjaan	0			
JUMLAH	13.392.396.853,00	1.115.391.000,00	357.819.610,00	14.149.968.243,00

1) Rincian **mutasi penambahan** aset tahun 2022 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
	Penambahan :	
1	Belanja Modal	1.101.289.000,00
2	Reklas Dari B. Pegawai	
3	Reklas Dari B. Jasa	
4	Reklas Dari B. Persediaan	
5	Reklas Dari B. Pemeliharaan	14.102.000,00
6	Reklas Dari Persediaan Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ke-3	
7	Hibah Masuk (Pemerintah Pusat)	
8	Hibah Masuk (Pemerintah Provinsi)	
9	Hibah Masuk (Pihak Ke-3)	
10	Hibah Masuk (Komite Sekolah)	
11	Mutasi Masuk	
12	Hutang Aset	
13	Reklas Dari Aset Lainnya (Rusak Berat)	
14	Reklas Dari Aset Lainnya (Detail Engeneering)	
15	Reklas Aset Tetap Dari KDP	
16	Koreksi Tambah (Mutasi Masuk Tahun Sebelumnya)	
17	Koreksi Tambah (Inventarisasi Barang Belum Tercatat/Berlebih)	
18	Koreksi Tambah (Hibah Masuk Tahun Sebelumnya)	
19	Koreksi Tambah (Atribusi Nilai Sertifikat Tanah Tahun Sebelumnya)	
20	Koreksi Tambah (Hilang Pencatatan)	
21	Koreksi Tambah (Perubahan Tabel Perhitungan Kapitalisasi)	
22	Koreksi Tambah (Perubahan Batas Nilai Kapitalisasi)	
23	Koreksi Tambah (Reklasifikasi Antar Kode Aset Tetap)	
24	Koreksi Tambah (Penilaian Aset Tetap)	
25	Koreksi Tambah (Reklasifikasi Detail Engeneering Ke Aset Tetapnya Tahun Sebelumnya)	
26	Koreksi Tambah (.....)	
	Jumlah Penambahan	1.115.391.000,00

Penjelasan :

Penambahan berupa :

- a) Belanja Modal tahun 2022 senilai Rp 1.101.289.000,00 .
- b) Reklas dari belanja pemeliharaan berupa barang seperti Mic, Loudspeaker dan UPS senilai Rp 14.102.000,00

Pengurangan berupa :

2) Rincian **mutasi pengurangan** aset tahun 2022 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
	Pengurangan :	
1	Extrakomtable	
2	Reklas Ke B. Persediaan	
3	Reklas Ke B. Pemeliharaan	
4	Reklas Ke B. Perjalanan Dinas	
5	Reklas Ke B. Pegawai	
6	Reklas Ke B. Jasa	2.720.000,00
7	Belanja Modal Untuk Pembayaran Hutang	
8	Hibah Keluar	
9	Mutasi Keluar	355.099.610,00
10	Reklas Dari KDP Ke Aset Tetap	
11	Rusak Berat (RB)	
12	Tidak Ditemukan (TD)	
13	Penghapusan Barang B/RR	
14	Reklas Ke Aset Tidak Berwujud (ATB)	
15	Koreksi Kurang (Penghapusan Tahun Sebelumnya)	
16	Koreksi Kurang (Mutasi Keluar Antar Opd Tahun Sebelumnya)	
17	Koreksi Kurang (Perubahan Batas Nilai Kapitalisasi)	
18	Koreksi Kurang (Perubahan Tabel Perhitungan Kapitalisasi)	
19	Koreksi Kurang (Reklasifikasi Antar Kode Aset Tetap)	
20	Koreksi Kurang (Pemeliharaan Tahun Sebelumnya)	
21	Koreksi Kurang (Dobel Pencatatan)	
22	Koreksi Kurang (BHP Tahun Sebelumnya)	
23	Koreksi Kurang (Hibah Keluar Tahun Sebelumnya)	
24	Koreksi Kurang (.....)	
	Jumlah Pengurangan	357.819.610,00 -

Penjelasan :

- a) Reklas ke Belanja Jasa berupa Honor Pengadaan Kit Siap Nikah senilai Rp 2.720.000.00 .
- b) Mutasi Keluar SKPD Lain , yaitu ke dinas peternakan, bagian perekomian dan kecamatan Bulakamba senilai total Rp . 355.099.610,00

2. Akumulasi Penyusutan

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2022 tidak termasuk penyusutan atas aset tetap yang telah diusulkan penghapusannya dan telah dipindahbukukan ke kelompok Aset Lainnya akun Aset Lain-lain. Mutasi Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2022 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.437.561.854,00	780.000.885,00	309.695.340,00	5.907.867.399,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	758.290.652,00	90.082.643,00	2,00	848.373.293,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	49.990.000,00		49.990.000,00	
Jumlah	6.245.842.506,00	870.083.528,00	49.990.017,00	6.756.240.692,00

Penambahan akumulasi penyusutan selama tahun 2022 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian	Beban Penyusutan	Hibah Masuk	Mutasi Masuk	Koreksi Tambah	Jumlah Penambahan
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	780.000.882,00			3,00	780.000.885,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	90.082.643,00				90.082.643,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan					
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya					
Jumlah	870.083.525,00			3,00	870.083.528,00

Pengurangan akumulasi penyusutan selama tahun 2022 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian	Penghapusan	Mutasi Keluar	Koreksi Kurang	Jumlah Pengurangan
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		309.695.325,00	15,00	309.695.340,00

Uraian	Penghapusan	Mutasi Keluar	Koreksi Kurang	Jumlah Pengurangan
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan			2,00	2,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya			49.990.000,00	49.990.000,00
Jumlah		309.695.325,00	49.990.017,00	359.685.342,00

C. DANA CADANGAN

Saldo Dana Cadangan Tahun 2022 sebesar NIHIL

D. ASET LAINNYA

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp 5.608.315,00 dan Rp 7.408.315,00 dengan rincian :

ASET LAINNYA	Saldo Th. 2022	Saldo Th. 2021
Tagihan Jangka Panjang		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tidak Berwujud	34.000.000,00	34.000.000,00
Aset Lain-lain	191.922.150,00	257.175.823,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(34.000.000,00))	(32.200.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(186.313.835,00)	(251.567.508,00)
Jumlah	5.608.315,00 -	7.408.315,00

1. Tagihan Jangka Panjang tahun 2022 sebear Rp nihil
2. Aset Tak Berwujud

Aset tersebut merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember tahun 2022 sebesar Rp 34.000.000 . Saldo tersebut berupa software/aplikasi.

Penambahan Aset Tidak Berwujud sebagai berikut :

- a. Pengadaan software/aplikasi tahun 2022 sebesar Rp 0
- b. Koreksi salah catat saldo tahun sebelumnya sebesar Rp 0

Pengurangan Aset Tidak Berwujud sebagai berikut :

- a. Penghapusan software/aplikasi tahun 2021 sebesar Rp 0
- b. Koreksi pengurangan karena salah catat saldo tahun sebelumnya sebesar Rp 0

3. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 34.000.000,00 Mutasi terdiri atas :

- a. Saldo awal Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2022 sebesar Rp (32.200.000,00)
- b. Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2022 sebesar Rp 1.800.000,00
- c. Koreksi penambahan Amortisasi Aset Tidak Berwujud salah catat saldo tahun lalu sebesar Rp 0
- d. Koreksi pengurangan Amortisasi Aset Tidak Berwujud salah catat saldo tahun lalu sebesar Rp 0
- e. dst ...

4. Aset Lain-lain Rp 191.922.150,00

terdiri atas :

- a. Aset tetap Rusak Berat (RB)/TD saldo sebesar Rp 191.922.150,00
- b. Aset tetap yang telah tidak digunakan dalam operasional pemerintah saldo sebesar Rp .

Mutasi Aset Lain-lain dijelaskan pada tabel berikut :

Uraian	Saldo 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2022
Aset Tetap Rusak Berat/TD	257.175.823,00		65.253.673,00	191.922.150,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah				
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat				
Jumlah	257.175.823,00		65.253.673,00	191.922.150,00

- 1) Penambahan Barang RB/TD tahun 2022 sebesar Rp 0
- 2) Pengurangan barang RB/TD tahun 2022 sebesar Rp 0
 - a) Pengurangan karena penghapusan sebesar Rp 65.253.673,00. Atas barang-barang tersebut yang telah dihapusbukukan dan tidak tercatat pada KIB.
 - b) Pengurangan karena koreksi salah catat sebesar Rp 0 .

c. Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat/TD

Uraian	Saldo 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2022
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(251.567.508,00)	65.253.673,00		(186.313.835,00)
Jumlah	(251.567.508,00)	65.253.673,00		(186.313.835,00)

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Barang RB/TD merupakan Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang RB/TD dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Penambahan karena pindah kondisi dari Barang Baik (B) ke Rusak Berat (RB) sebesar Rp 65.253.673,00 .
- 2) Penambahan karena koreksi salah catat saldo tahun sebelumnya sebesar Rp 0.
- 3) Pengurangan karena penghapusan sebesar Rp 0 .
- 4) Pengurangan karena koreksi salah catat saldo tahun sebelumnya sebesar Rp 0 .

3.4.2 Kewajiban

3.4.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, dengan saldo masing-masing sebesar Rp 92.673.176,00 dan Rp 87.329.648,00

dapat dirinci sebagai berikut :

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK :	Saldo Th. 2022	Saldo Th. 2021
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Utang Pinjaman Jangka Pendek		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja	92.673.176,00	87.329.648,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah	92.673.176,00	87.329.648,00

1. *Utang Belanja*

Utang Belanja merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Brebes terkait dengan Beban Pegawai dan Beban Barang tahun anggaran sebelumnya namun belum diselesaikan. Saldo utang ini per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 92.673.176,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Saldo Th. 2022	Saldo Th. 2021
Utang Belanja Pegawai	77.978.809,00	73.254.875,00
Utang Belanja Barang dan Jasa - Persediaan		
Utang Belanja Barang dan Jasa - Pemeliharaan		
Utang Belanja Barang dan Jasa - Jasa	14.694.367,00	14.074.773,00
Utang Belanja Barang dan Jasa - Perjalanan Dinas		
Utang Belanja Bunga		
Utang Belanja Subsidi		
Utang Belanja Hibah		
Utang Belanja Tidak Terduga		
Utang Belanja Bagi Hasil		
Utang Belanja Bantuan Keuangan		
Utang Belanja Bantuan Sosial		
Utang Beban Lain-lain		
Jumlah	92.673.176,00	87.329.648,00

Utang Belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan :
- a. Utang Belanja Pegawai merupakan :

1) Utang TPP bulan Desember 2022 sebesar Rp 77.978.809

2) Utang Upah Pungut Pajak/retribusi triwulan IV sebesar Rp

3) Koreksi salah catat tahun sebelumnya sebesar Rp 0
- b. Utang Belanja Barang/Persediaan merupakan:

1) Utang atas pengadaan obat-obatan sebesar Rp 0

2) Utang atas pengadaan sebesar Rp 0

3) Utang atas pengadaan natura dan pakan sebesar Rp 0
- c. Utang Belanja Pemeliharaan merupakan:

1) Utang atas Pemeliharaansebesar Rp 0

2) Utang atas Pemeliharaansebesar Rp 0

3) Koreksi salah catat tahun sebelumnya sebesar Rp 0
- d. Utang Belanja Jasa merupakan :

1) Utang atas belanja Telepon sebesar Rp 34.634,00

- 2) Utang atas belanja Air sebesar Rp 740.250,00
- 3) Utang atas belanja Internet sebesar Rp 7.336.148,00
- 4) Utang atas belanja Listrik sebesar Rp. 6.583.335,00
- 5) Utang atas belanja Jasa Tenaga BLUD sebesar Rp 0
- 6) Koreksi salah catat tahun sebelumnya sebesar Rp 0
- e. Utang Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 0

2. Pengurangan :

- a. Utang Belanja Pegawai merupakan pembayaran dan koreksi catat utang belanja tahun sebelumnya sebagai berikut :
 - 1) Utang TPP bulan Desember 2021 sebesar Rp 73.254.875
 - 2) Utang Upah Pungut Pajak/retribusi triwulan IV sebesar Rp
 - 3) Koreksi salah catat tahun sebelumnya sebesar Rp 0
- b. Utang Belanja Barang/Persediaan merupakan pembayaran dan koreksi catat utang belanja tahun sebelumnya sebagai berikut :
 - 1) Utang atas pengadaan obat-obatan sebesar Rp 0
 - 2) Utang atas pengadaan sebesar Rp 0
 - 3) Utang atas pengadaan natura dan pakan sebesar Rp 0
- c. Utang Belanja Pemeliharaan merupakan pembayaran dan koreksi catat utang belanja tahun sebelumnya sebagai berikut :
 - 1) Utang atas Pemeliharaansebesar Rp 0
 - 2) Utang atas Pemeliharaansebesar Rp 0
 - 3) Koreksi salah catat tahun sebelumnya sebesar Rp 0
- d. Utang Belanja Jasa merupakan pembayaran dan koreksi catat utang belanja tahun sebelumnya sebagai berikut:
 - 1) Utang atas belanja Telepon sebesar Rp 40.588,00
 - 2) Utang atas belanja Air sebesar Rp 720.700,00
 - 3) Utang atas belanja Internet sebesar Rp 7.324.546,00
 - 4) Utang atas belanja Listrik sebesar Rp. 5.988.939,00
 - 5) Utang atas belanja Jasa Tenaga BLUD sebesar Rp 0
 - 6) Koreksi salah catat tahun sebelumnya sebesar Rp 0
- e. Utang Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 0

3.4.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran dengan saldo per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar NIHIL.

3.4.2.3 R/K PPKD

Rekening ini merupakan rekening perantara yang digunakan oleh SKPD pada saat menerima SP2D dari BUD atau menyetor kas ke BUD. Saldo R/K PPKD sebelum konsolidasi per 31 Desember 2022 adalah sebesar NIHIL.

3.4.3 Ekuitas

Rekening ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dikuasai, setelah dikurangi hak pihak (*claim*) ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas pada Neraca Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB). Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 8.501.577.872,00 dan Rp 7.986.575.176,00 . Perubahan atas ekuitas tahun 2022 dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2022 :	NILAI (Rp)
EKUITAS AWAL	7.986.575.176,00
Surplus/(Defisit)-LO	(16.164.286.882,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KEALAHAN MENDASAR :	
Koreksi Ekuitas	(2.927.591.047,00)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	19.606.880.625,00
EKUITAS AKHIR	8.501.577.872,00

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

3.5. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.

Nilai surplus/(defisit) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp (19.606.880.625,00) . Sedangkan nilai Surplus Defisit-LO sebesar Rp (16.164.286.882,00) sehingga memiliki perbedaan sebesar Rp 3.442.593.743 . Perhitungan perbedaan nilai secara keseluruhan hubungan LRA-LO dijelaskan dalam tabel berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Surplus/(Defisit) LRA	(19.606.880.625,00)
Penambahan	10.226.426.392,00
Pengurangan	6.783.832.649,00
Surplus/(Defisit) LO	(16.164.286.882,00)

Adapun penjelasan penambahan dan pengurangan disampaikan dalam lampiran 3.7.1

3.5.1. Penjelasan masing-masing pos terkait perbedaan pengakuan antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

3.5.1.1. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan-LO dengan Pendapatan-LRA

Pendapatan Daerah	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan			
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	3.430.609.851,00		3.430.609.851,00
Jumlah	3.430.609.851,00		3.430.609.851,00

1. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

a. Pendapatan Hibah

Selisih antara Pendapatan Hibah-LO dengan Pendapatan Hibah-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Hibah-LO	3.430.609.851,00		(3.430.609.851,00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat th. 2021	
Penambahan piutang Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya/Prov th. 2021	
Penambahan piutang Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri th. 2022	
Penambahan piutang Sumbangan Pihak ketiga/sejenis th. 2022	
Penambahan Hibah Masuk Persediaan	3.430.609.851,00
Penambahan Hibah Masuk Aset Tetap	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas penerimaan piutang Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat th. 2022	
Pengurangan atas penerimaan piutang Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya/Prov th. 2022	
Pengurangan atas penerimaan piutang Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri th. 2022	
Pengurangan atas penerimaan piutang Sumbangan Pihak ketiga/sejenis th. 2022	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	3.430.609.851,00

3.5.1.2. Pengungkapan Perbedaan Beban-LO dengan Belanja-LRA

3.5.1.2.1. Beban Operasi

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Pegawai	2.680.361.529,00	2.672.917.595,00	(7.443.934,00)
Beban Barang dan Jasa	15.820.643.574,00	15.832.674.030,00	12.030.456,00
Beban Bunga			
Beban Subsidi			
Beban Hibah			
Beban Bantuan Sosial	222.008.105,00		(222.008.105,00)
Beban Penyisihan Piutang			
Beban Lain-lain			
Jumlah	18.723.013.208,00	18.505.591.625,00	(217.421.583,00)

1. Beban Pegawai

Selisih Beban Pegawai pada LO dan Belanja Pegawai pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan ASN			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Gaji dan Tunjangan ASN th. 2022	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Gaji dan Tunjangan ASN	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

b. Beban Tambahan Penghasilan ASN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.677.641.529,00	2.672.917.595,00	(4.723.934,00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Tambahan Penghasilan ASN th. 2022	77.978.809,00
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Tambahan Penghasilan ASN	73.254.875,00
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	4.723.934,00

c. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.720.000,00		(2.720.000,00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN th. 2022	2.720.000,00
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	2.720.000,00

2. Beban Barang dan Jasa

Selisih beban barang dan jasa pada LO dengan belanja barang dan jasa pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Persediaan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Barang	1.927.936.268,00	1.926.484.318,00	(1.451.950,00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Saldo Awal	919.942.162,00
Penambahan Reklas dari Belanja Tak Terduga	
Penambahan Reklas Belanja Modal	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan	
Penambahan Mutasi Masuk	1.045.400,00
Penambahan Hibah Masuk	3.430.609.851,00
Penambahan Hutang Persediaan	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Persediaan	
Pengurangan Koreksi Saldo Awal	
Pengurangan Mutasi Keluar	2.933.222.176,00
Pengurangan Hibah Keluar	222.008.105,00
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Ekstrakomptabel	
Pengurangan Reklas ke B. Pegawai	
Pengurangan Reklas ke B. Jasa	
Pengurangan Reklas ke B.Pemeliharaan	

Uraian	(Rp)
Pengurangan Saldo Akhir	1.194.915.182,00
Selisih	1.451.950,00

b. Beban Jasa

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Jasa	12.970.322.499,00	12.754.702.905,00	(215.619.594,00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan dari Jasa yang diberikan kepada pihak ke 3/Masyarakat	215.000.000,00
Penambahan Hutang Beban Jasa	14.694.367,00
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	
Penambahan Reklas dari Beban Persediaan	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan	
Penambahan Reklas dari Beban Dibayar di Muka\	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Jasa	14.074.773,00
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Pemeliharaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Dibayar di Muka	
Selisih	215.619.594,00

c. Beban Pemeliharaan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Pemeliharaan	205.644.479,00	219.746.479,00	14.102.000,00

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Hutang Beban Pemeliharaan	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	
Penambahan Reklas dari Beban Persediaan	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Pemeliharaan	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	14.102.000,00
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	

Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Selisih	(14.102.000,00)

d. Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Perjalanan Dinas	716.740.328,00	716.740.328,00	

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Hutang Beban Perjalanan Dinas	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	
Penambahan Reklas dari Beban Persediaan	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Perjalanan Dinas	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Selisih	

e. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		215.000.000,00	215.000.000,00

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Hutang Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	
Penambahan Reklas dari Beban Persediaan	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	

Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	215.000.000,00
Pengurangan Reklas ke Beban Hibah	
Pengurangan Reklas ke Beban Bantuan Sosial	
Selisih	215.000.000,00

3. Beban Bantuan Sosial (khusus SKPD pengelola Bansos)
Selisih Beban Bantuan Sosial LO dengan Belanja BAntuan Sosial pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
eban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	222.008.105,00		222.008.105,00

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklas dari Belanja Modal	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan	
Penambahan Hutang Beban Hibah kepada kelompok Masyarakat	
Penambahan Hibah Keluar barang persediaan kepada kelompok masyarakat	222.008.105,00
Penambahan Hibah Keluar barang Aset Tetap kepada kelompok masyarakat	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke B. Persediaan	
Pengurangan Reklas ke B. Pegawai	
Pengurangan Reklas ke B. Jasa	
Pengurangan Reklas ke B.Pemeliharaan	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Hibah kepada kelompok masyarakat	
Selisih	

3.5.1.2.2. Beban Penyusutan Dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi hanya diakui pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran.

1. Beban Penyusutan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	780.000.882,00		(780.000.882,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	90.082.643,00		(90.082.643,00)

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi			
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			
Beban Penyusutan Aset Lainnya			
Jumlah	870.083.525,00		(870.083.525,00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyusutan th. 2022	870.083.525,00
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (tambah)	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (kurang)	
Selisih	870.083.525,00

2. Beban Amortisasi

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.800.000,00		(1.800.000,00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Amortisasi th. 2022	1.800.000,00
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (tambah)	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (kurang)	
Selisih	1.800.000,00

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 UMUM

Kabupaten Brebes memiliki eksistensi untuk membangun kompetensi daerah yang berbeda saing dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki meliputi sumber daya manusi, ilmu pengetahuan dan teknologi demi peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes memiliki Tugas Pokok membantu Bupati Brebes dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang promosi keluarga berencana, kesehatan reproduksi, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak.

4.2 ORGANISASI

Struktur Organisasi SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB), membawahi :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
 - 1) Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan;
 - 2) Sub Koordinator Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
- d. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:
 - 1) Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - 2) Sub Koordinator Advokasi, Penyuluhan dan Penggerakan.

- e. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :
 - 1) Sub Koordinator Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana;
 - 2) Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis.

4.3 PERSONALIA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes memiliki 73 personil, terdiri dari 1 orang Kepala 1 orang sekretaris , 3 orang Kepala Bidang, 7 orang Kasubag/Kasi, 62 orang staf di mana 8 orang adalah PNS dan 54 orang adalah tenaga kontrak/tenaga harian lepas.

BAB V
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Tahun Anggaran 2022. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BREBES

Drs. Akhmad Ma'mun, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19671117 199403 1 009